

# PERANAN PEREMPUAN PADA PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM PERSPEKTIF GENDER DI KABUPATEN BADUNG

**Luh Kadek Budi Martini**

Fakultas Ekonomi Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email : Jro Seruni@gmail.com

## Abstrak

*The main objective of this study is to investigate the role of women in economic development in a gender perspective. Data collected by survey techniques in several government agencies in Badung . Data analysis was done by narrating in full or analyze qualitative interpretations in accordance with the real conditions in society . The study found gender inequality still occur on several indicators , among others, labor force participation of women are much lower than men in economic development . So as to increase the role of women in economic development efforts should be made of the parties involved , especially employers to provide opportunities and recruitment fair , male or female according to the needs*

*Keywords : gender , women , economic development , labor force participation*

## I. PENDAHULUAN

Pada era ini perhatian dunia terhadap isu gender nampaknya cukup serius, terbukti dengan dimasukkannya persoalan ini sebagai salah satu bagian dari delapan kesepakatan *Millenium Development Goals (MDGs)*. Secara historis, wacana gender mulai muncul kepermukaan sekitar tahun 40-an yang digagas oleh kaum feminis di dunia barat, kemudian mulai mencuat sekitar tahun 1977 ketika sekelompok feminis di London tidak lagi memakai isu-isu lama seperti *patriarchat* atau *sexist* dalam membahas hubungan laki-laki dan perempuan. Ini merupakan perkembangan yang cerdas, karena sebenarnya masalah ketidaksetaraan hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagian besar dibentuk oleh perbedaan konstruksi “perempuan” dan “laki-laki” secara sosial budaya, dan bukan secara biologis (seks atau kelamin). Oleh karena itu, pemindahan wacana ketidaksetaraan tersebut dari panggung biologis ke panggung sosial budaya/gender secara teoritis lebih efektif (Nugroho, 2008; x). Selanjutnya hal ini menjadi semakin menarik perhatian banyak ilmuwan sosial khususnya kaum feminis.

Besarnya perhatian kaum feminis terhadap persoalan gender dan perempuan disebabkan masih terjadinya ketidakadilan gender dalam berbagai kehidupan baik

dalam keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Eksistensi perempuan dalam masyarakat masih dipandang sebagai warga kelas dua sehingga mereka masih menduduki posisi subordinat dan termarginal. Posisi demikian ini kurang menguntungkan bagi kaum perempuan dibanding lawan jenisnya. Untuk memperbaiki nasib kaum perempuan, berbagai upaya telah dilakukan oleh kaum feminis baik di dunia barat maupun di Indonesia. Untuk di Indonesia salah seorang pejuang nasib kaum perempuan yang tidak asing lagi di kalangan masyarakat adalah Raden Ajeng Kartini. Perjuangan R.A Kartini tidak berhenti meskipun ia telah tiada, cita-citanya ditindaklanjuti oleh tokoh-tokoh perempuan Indonesia lainnya yang memiliki visi serupa dengan Kartini seperti R.A Sutinah Joyopranoto, Rr, Rukmini dan lain-lain.

Perjuangan R.A Kartini merupakan embrio perjuangan hak perempuan di Indonesia. Wujud pergerakan perempuan pasca Kartini adalah terbentuknya berbagai organisasi perempuan yang mempunyai visi memperbaiki status kaum perempuan melalui berbagai upaya seperti peningkatan pendidikan dan keterampilan, perlindungan hukum dan lain-lain. Pada dekade berikutnya

organisasi perempuan ini menyelenggarakan kongres perempuan pertama pada tanggal 22 Desember 1928 di Yogyakarta dan ini merupakan tonggak sejarah yang sangat penting bagi pergerakan perempuan Indonesia. Namun demikian selama setengah abad dari pelaksanaan kongres ini, pergerakan perempuan Indonesia belum mendapat perhatian yang serius dari pemerintah meskipun setelah merdeka persamaan hak, kesempatan dan perlakuan antara laki-laki dan perempuan telah tertuang dalam UUD 45 ps. 27.

Secara kongkrit pernyataan ini baru tertuang dalam garis-garis besar haluan negara (GBHN) tahun 1978 atau 50 tahun setelah Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) I yang sekaligus diikuti oleh berdirinya Kementerian Urusan Peranan Wanita. Oleh karena itu, saat ini secara normatif baik dalam Undang-undang Dasar 1945 maupun dalam GBHN 1978 sampai GBHN 1999 dan RPJMN saat ini telah tercantum adanya hak, kewajiban dan kesempatan yang sama antara kaum laki-laki dan perempuan dalam segala aspek pembangunan. Disamping itu pemerintah juga telah meratifikasi konvensi ILO No. III dengan UU No. 80 tahun 1957 tentang pengupahan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam jenis pekerjaan yang sama nilainya dan juga telah meratifikasi konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW) dengan UU. No. 7 tahun 84..

Berbagai kebijakan dan strategi pembangunan mulai dari Women in Development (WID), Women and Development (WAD), Gender and Development (GAD) dan Gender Mainstreaming (GM) yang diikuti oleh strategi pengarusutamaan gender melalui Inpres No. 9/2000. telah ditempuh oleh pemerintah untuk mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) di masyarakat. Kesetaraan dan Keadilan Gender ini menjadi Visi dari pembangunan pemberdayaan Perempuan. Namun demikian, apa yang telah diupayakan oleh pemerintah sejak tiga dasa warsa lebih nampaknya belum menampilkan hasil yang maksimal. Hal ini tercermin dari kenyataan yang masih terjadi di

masyarakat Bali pada umumnya dan khususnya di Kabupaten Badung dimana ketimpangan gender pada beberapa bidang pembangunan masih relatif menonjol, seperti di bidang pendidikan, ketenagakerjaan termasuk di bidang pariwisata.

Pada dasarnya munculnya permasalahan perempuan dan isu gender di masyarakat disebabkan adanya konstruksi sosial budaya yang meletakkan peran laki-laki dan perempuan secara berbeda-beda yang didasarkan pada pemahaman perbedaan biologis dan fisiologis dari laki-laki dan perempuan. Ideologi gender yang berkembang di masyarakat telah menentukan bahwa rumah tangga atau ranah domestik adalah dunianya perempuan sedangkan ranah publik menjadi dunianya laki-laki. Dikotomi peran yang demikian ini yang kemudian diiringi dengan munculnya budaya patriarki cenderung menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perlakuan yang kurang menguntungkan bagi kaum perempuan seperti perlakuan diskriminatif. Ketidakadilan gender yang demikian ini mengakibatkan terjadinya ketimpangan gender pada beberapa aspek kehidupan di masyarakat (Arjani, 2003).

Sebagai komitmen pemerintah pusat maupun daerah dalam menangani masalah perempuan, maka saat ini tingkat Provinsi dan Kabupaten telah terbentuk struktur kelembagaan yang khusus menangani pemberdayaan perempuan. Di tingkat Provinsi Bali sejak pertengahan tahun 2008 bagian Pemberdayaan Perempuan telah di ubah statusnya menjadi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sementara untuk di Kabupaten Badung juga telah berubah dari sub bagian menjadi Kantor Pemberdayaan Perempuan. Meskipun lembaga khusus tentang peningkatan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) telah dibentuk lengkap dengan kebijakan dan program-programnya, bukan berarti KKG ideal dapat dicapai dengan mudah. Justru dalam beberapa hal sebaliknya, seperti telah disinggung di atas bahwa permasalahan KKG ini masih terjadi di masyarakat terlihat lebih jelas dan perlu dicarikan jalan keluarnya dengan lebih focus.

Permasalahan belum tercapainya KKG ini bisa dilihat dengan masih terjadinya kesenjangan gender diberbagai sektor pembangunan. Oleh karena itu, untuk menunjukkan atau memberi gambaran secara lebih nyata tentang kesenjangan gender yang masih terjadi sangat diperlukan bukti-bukti berupa data pendukung yang terpublikasi dalam bentuk buku statistik gender. Dengan demikian akan dapat diketahui secara lebih jelas kesenjangan yang terjadi yang pada gilirannya dapat memberikan petunjuk secara jelas kepada para penentu kebijakan dan penyusun program. Pada dasarnya data terpilah berdasarkan jenis kelamin yang ada pada buku statistik gender dapat dipakai dasar dalam menyusun kebijakan/program/kegiatan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG). Jika para perencana sudah mampu menyusun PPRG berlandaskan pada data riil yang ada di Kabupaten Badung, maka dapat dipastikan strategi pengarusutamaan gender dapat di aplikasikan secara cepat. Ini pada gilirannya akan dapat mempercepat terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran perempuan pada pembangunan, khususnya di bidang ekonomi. Sehingga yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran perempuan pada pembangunan, khususnya di bidang ekonomi dan rekomendasi berkaitan dengan peran perempuan dalam pembangunan.

## II. METODELOGI PENELITIAN

Data dikumpulkan dengan teknik survei di beberapa instansi-instansi pemerintahan yang ada di Kabupaten Badung seperti Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Badung, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan Kabupaten Badung, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Kantor instansi yang terkait dengan penelitian.

Jenis data yang dikoleksi dalam penelitian adalah data kuantitatif. Data

primer dikoleksi dari hasil-hasil survey yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) seperti Suvei Sosial Ekonomi (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), dan dari berbagai sumber seperti dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan SKPD terkait lainnya.

Analisis data dilakukan secara mendalam dengan cara menarasikan secara lengkap atau menganalisis secara kualitatif data yang ada pada setiap tabel. Dalam analisis ini akan diberikan penafsiran-penafsiran sesuai dengan kondisi nyata dimasyarakat, namun penafsiran ini baru berupa dugaan sementara yang pada gilirannya untuk menguji kebenarannya masih perlu dilakukan kajian lebih lanjut.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ekonomi merupakan aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Istilah "ekonomi" sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu (*oikos*) yang berarti "keluarga, rumah tangga" dan (*nomos*) yang berarti "peraturan, aturan, hukum". Secara garis besar, ekonomi diartikan sebagai "aturan rumah tangga" atau "manajemen rumah tangga. Indonesia memiliki ekonomi berbasis-pasar di mana pemerintah memainkan peranan penting.

Untuk mengetahui tingkat kesejahteraan suatu masyarakat antara lain bisa dilihat melalui pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu pembangunan sektor ekonomi menjadi begitu penting karena sangat terkait dengan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Alam dengan berbagai potensinya dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh dan untuk kesejahteraan ekonomi manusia. Jadi, kegiatan atau pembangunan ekonomi sangat ditentukan oleh sumber daya manusia sebagai penggerakannya. Terkait dengan masalah tersebut, beberapa hal yang menyangkut sumber daya manusia terutama yang berkaitan masalah perkerjaan sangat penting untuk mendapat perhatian. Apaun masalah-masalah tersebut adalah: angkatan kerja, pekerja

dan jenis pekerjaan, lapangan pekerjaan dan lain sebagainya.

Berbagai usaha telah dilakukan oleh pemerintah terkait dengan sector ekonomi, satu diantaranya adalah dengan melakukan sensus ekonomi. Sensus ekonomi bertujuan untuk mengumpulkan data mengenai kegiatan ekonomi angkatan kerja, yaitu tentang lapangan kerja, jenis pekerjaan, dan status pekerjaan penduduk yang bekerja. Variabel tersebut seringkali dikaitkan dengan variabel ekonomi seperti tingkat dan laju pertumbuhan GNP (*Gross National Product*/Produk Nasional Bruto) per kapita dan alokasi GNP per sektor untuk menggambarkan pengaruh pembangunan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja, produktivitas, dan pendapatan penduduk yang bekerja. Khususnya alokasi angkatan kerja menurut lapangan pekerjaan terutama persentase penduduk yang bekerja di sektor pertanian, industri (manufaktur), dan jasa dianggap sebagai salah satu indikator penting untuk mengukur tingkat pembangunan suatu daerah.

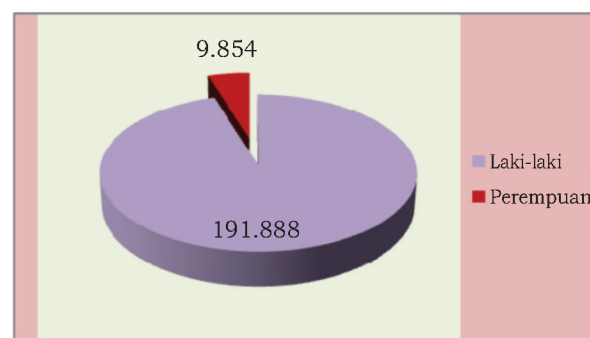
Situasi dan kondisi suatu masyarakat sangat beragam sifatnya. Hal ini ditunjukkan oleh sistem sosial budaya masyarakat seperti adanya perbedaan kesempatan kerja, peluang kerja, dan jenis pekerjaan yang diberikan antara laki-laki dan perempuan kemudian mengakibatkan perbedaan indikator ketenagakerjaan antara kedua jenis kelamin tersebut. Idealnya, setiap pekerjaan dapat diberikan secara terbuka kepada kedua jenis kelamin asalkan mereka mau dan mampu atau sanggup mengerjakannya, kecuali jenis pekerjaan yang secara mendasar memang harus dilakukan oleh salah satu jenis kelamin tertentu. Dilihat dari perspektif gender hal yang penting dikaji adalah mengkritisi relasi penduduk laki-laki dan perempuan di bidang ekonomi, termasuk memastikan apakah masing-masing jenis kelamin terutama perempuan mampu bersaing untuk merebut peluang dan kesempatan kerja di pasar tenaga kerja. Secara konseptual dunia kerja di Indonesia mengakui bahwa penduduk yang tergolong angkatan kerja dan sebagai pekerja adalah mereka yang berusia di atas 10 tahun. Berdasarkan data sensus/survei indikator

ketenagakerjaan menyangkut hal-hal seperti tenaga kerja asing, kegiatan utama yang dilakukan penduduk, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), lapangan kerja dan status pekerjaan, tingkat upah, dan sebagainya

### Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK, secara umum selama tiga tahun terakhir (2010-2012) terjadi penurunan yang signifikan TPAK laki-laki di Kabupaten Badung. Sedikit berbeda dengan TPAK perempuan yang mengalami fluktuasi, baik di bidang sex ratio maupun tingkat partisipasi yakni mengalami kenaikan di tahun 2011 dan sedikit menurun di tahun 2012. Jika dilihat dari data, kemudian disesuaikan dengan kenyataan di lapangan tampaknya masih ada kejanggalan. Di Bali perempuan terkenal sebagai pekerja keras dan lebih ulet bekerja dibandingkan dengan laki-laki. Namun TPAK perempuan sangat rendah, seperti nampak pada Gambar 1, TPAK perempuan hanya 9.854 sedangkan laki-laki 191.888 atau TPAK perempuan 4,88 % dan laki-laki 95,12 % dari total TPAK Kabupaten Badung. Jika dilihat pada masyarakat Badung yang kesempatan kerjanya cukup luas baik di bidang pariwisata, pertanian dan bidang-bidang lainnya, sangat besar kemungkinannya peran perempuan di sektor ketenagakerjaan dan besar perannya dalam menunjang ekonomi keluarga dan itu menunjukkan terjadinya kesenjangan gender.

**Gambar..1**  
**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**  
**menurut Jenis kelamin**  
**Tahun 2011**



Sumber : Sumber: BPS Kabupaten Badung, 2011.



### Lapangan Kerja

Selama di tahun terakhir (2011-2012) lapangan kerja terbanyak menyerap tenaga kerja adalah sektor perdagangan, rumah makan, dan hotel, diikuti oleh sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan, berikutnya adalah sektor pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan (pertanian dalam arti luas). Penyerapan tenaga kerja di ketiga sector tersebut dilihat dari aspek gender menunjukkan kondisi yang tidak berimbang, kecuali di sektor perdagangan, rumah makan, dan hotel, semua sector lapangan pekerjaan didominasi oleh tenaga kerja laki-laki. Hal ini terjadi kemungkinan di sector lapangan kerja lain kurang diminanti oleh perempuan karena kurang menjanjikan secara ekonomis atau memang perempuan tidak bisa masuk karena tidak mampu memenuhi

persyaratan, di samping faktor lain yang masih perlu dicari.

### Kelompok Wanita Tani (KWT)

Perkembangan KWT terbaik yang ditunjukkan oleh jumlah yang terus bertambah terjadi di 3 kecamatan berturut-turut yakni Kecamatan Mengwi (24 buah), Kecamatan Abian Semal (22 buah) dan Kecamatan Petang (20 buah), seperti yang ditampilkan pada Tabel 1. Perlu dipahami bahwa kebijakan pembentukan KWT ini merupakan upaya untuk dapat menjadikan perempuan tani lebih berdaya dan lebih mandiri, dan pada gilirannya mampu memberi kesejahteraan hidupnya. Oleh karena itu KWT ini sangat penting dijaga eksistensinya karena mampu memberikan kontribusi positif terhadap para anggotanya dan masyarakat secara umum

**Tabel1**  
**Jumlah kelompok Wanita Tani (KWT) di Kabupaten badung**  
**Tahun 2009 – 2011.**

Kecamatan	Tahun		
	2009	2010	2011
Patang	2	2	2
Abiansemal	3	2	2
Mengwi	2	2	2
Kuta Utara	1	1	1
Kuta	0	1	1
Kuta Selatan	2	2	2

Sumber : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab .Badung

### Tenaga penyuluh Pertanian

Secara keseluruhan pekerjaan sebagai penyuluh pertanian dan perkebunan serta perhutanan didominasi oleh tenaga kerja laki-laki. Seperti tampak dalam Tabel 2 dari 52 orang tenaga kerja penyuluh pertanian dan perkebunan yang ada, sebanyak 50 orang (96,23%) adalah laki-laki dan hanya 2 orang (3,77%) perempuan. Sementara itu, tenaga penyuluh perhutanan semuanya adalah laki-laki, yaitu sebanyak 7 orang (100%). Proporsi ini tentu sangat tidak mencerminkan kesetaraan gender. Hal ini

terjadi kemungkinan karena pekerjaan sebagai tenaga penyuluh pertanian dalam arti luas oleh banyak pihak dianggap sebagai pekerjaan yang keras dan membutuhkan fisik yang kuat.

Pekerjaan ini menuntut si pekerja berada langsung di lapangan di tengah kondisi lingkungan dan cuaca yang dianggap tidak cocok untuk fisik perempuan. Selain karena keterbatasan fisik bisa jadi ada angapan bahwa perempuan kurang mampu mentransfer pengetahuan dan keterampilan mereka kepada masyarakat tenaga kerja penyuluh

pertanian dan perhutanan adalah tenaga kerja yang memerlukan persyaratan dan keterampilan khusus yang mungkin saja tidak dimiliki perempuan. Oleh karena itu,

pekerjaan ini dianggap kurang pantas untuk perempuan dan sebaliknya, dianggap lebih cocok untuk laki-laki.

**Tabel. 2**  
**Jumlah Tenaga Penyuluh Perhutanan, Pertanian dan Perkebunan**  
**Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Badung Tahun 2011**

Kecamatan	Pertanian dan Perkebunan			Perhutanan		
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
Petang	7	0	7	3	0	3
Abiansemal	17	1	18	1	0	1
Mengwi	19	1	20	1	0	1
Kuta Utara	6	0	6	1	0	1
Kuta, Kuta Selatan	1	0	1	1		1
Jumlah	50	2	52	7	0	7

Sumber: Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Badung, 2011.

#### **Petugas kebersihan**

Kabupaten Badung merupakan daerah pariwisata yang tentunya sangat memerlukan kondisi wilayah yang bersih dan nyaman. Oleh karena itu, masalah kebersihan menjadi prioritas utama untuk diperhatikan. Masalah kebersihan akan membawa citra baik di mata masyarakat maupun wisatawan yang datang ke daerah ini. Untuk menciptakan daerah bersih dan asri harus didukung oleh petugas kebersihan dan oleh karena itu petugas kebersihan mempunyai peranan yang sangat penting untuk terciptanya citra bersih tersebut. Pada umumnya jenis pekerjaan yang dilakukan pada usaha jasa petugas kebersihan tidak memerlukan persyaratan tingkat pendidikan dan keahlian khusus. Namun yang dituntut adalah keterampilan dari mereka yang bekerja di bidang ini. Keterampilan yang diharapkan sesuai dengan jenis pekerjaan biasanya diberikan pada saat seseorang sudah diterima sebagai karyawan.

Dari data dijelaskan bahwa petugas kebersihan di Kabupaten Badung tidak mengalami banyak perubahan secara kuantitatif selama tiga tahun terakhir. Tenaga kebersihan terbanyak ada di Kecamatan Kuta karena daerah ini

merupakan sentra pariwisata sehingga memerlukan tenaga kebersihan paling banyak dibandingkan kecamatan lainnya. Dilihat dari perspektif gender secara jelas pada bidang ini masih didominasi oleh laki-laki. Hal ini kemungkinan disebabkan karena tugas ini dianggap memerlukan tenaga kuat dan waktu kerja yang tidak tentu.

#### **Tenaga Kerja ke Luar Negeri**

Jika dilihat dari perspektif gender tampak dengan jelas dalam konteks ini masih terjadi kesenjangan gender yang sangat tajam. Ada banyak faktor diduga menjadi penyebab kecilnya perempuan menjadi TKI, antara lain: Hal ini kemungkinan terjadi karena adanya rasa kekhawatiran bagi tenaga kerja perempuan kalau dia bekerja ke luar negeri. Di samping karena faktor lain seperti trauma akan adanya kasus-kasus kekerasan terhadap tenaga kerja wanita yang bekerja di luar negeri, keterikatan perempuan Bali terhadap keluarganya karena selama ini ideologi gender yang berkembang adalah bahwa tugas utama perempuan adalah di sektor domestik, sementara laki-lakilah yang bertugas di sektor publik.

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Di bidang ekonomi masih terjadi ketimpangan gender pada beberapa indikator antara lain TPAK perempuan yang jauh lebih rendah dari laki-laki. Kelompok wanita tani (KWT) jumlahnya berkembang secara kuantitatif.

Untuk menanggulangi persoalan pengangguran perlu dilakukan upaya dari pihak terkait terutama penyedia lapangan kerja untuk memberikan kesempatan dan merekrut tenaga kerja secara adil (laki-laki atau perempuan) sesuai dengan kebutuhan. Dalam konteks ini hal yang perlu dilakukan adalah memberikan keterampilan bagi penduduk laki-laki dan perempuan agar mereka memiliki skill. Dengan skill yang dimiliki mereka mampu membuka peluang kerja sendiri. Terkait dengan keberadaan KWT yang cenderung tidak berkembang, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap kelompok wanita tani (KWT) yang telah terbentuk. Dengan demikian akan diketahui permasalahan yang dihadapi setiap KWT dan pada gilirannya dapat dikembangkan sehingga mampu memberi manfaat kepada setiap anggotanya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arjani, dkk. 2005. "Profil Gender Bidang Pendidikan Provinsi Bali." (laporan penelitian). Denpasar: Pusat Studi Wanita UNUD.
- Badan Pusat Statistik. 2011. *Denpasar Dalam Angka*. Denpasar: Bappeda.
- Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan. 2001. Laporan Tahunan. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Badung
- Nugroho, Riant. 2008. *Gender dan Strategi Pengarusutamaan Gender di Indonesia*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.